

BAB 1

PENDAHULUAN

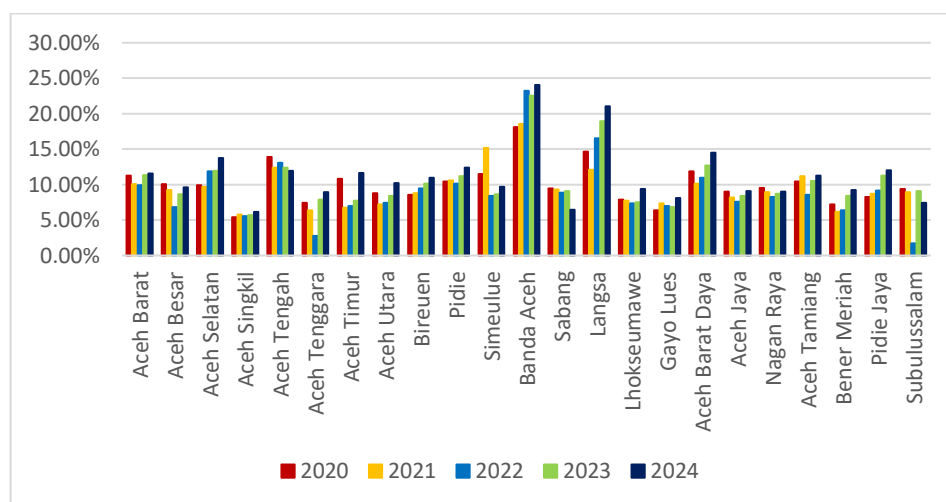
1.1 Latar Belakang

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah masing-masing. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan menjadi faktor yang sangat penting karena keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari kewenangan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri Habibi et al., (2024).

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan asli daerah, mengendalikan belanja, serta memanfaatkan dana publik untuk kepentingan pembangunan daerah. Salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan efisiensi belanja daerah Alif'ia et al., (2024).

Provinsi Aceh ialah salah satu daerah dengan status otonomi khusus memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Meskipun menerima Dana Otonomi Khusus (DOK), ketergantungan sebagian besar kabupaten/kota di Aceh terhadap transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum optimal. Di sisi lain, variasi capaian PAD dan realisasi belanja antara kabupaten/kota di Aceh menunjukkan adanya perbedaan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah Machfud et al, (2021).

Berikut data hasil Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2024 pada Gambar 1.1:



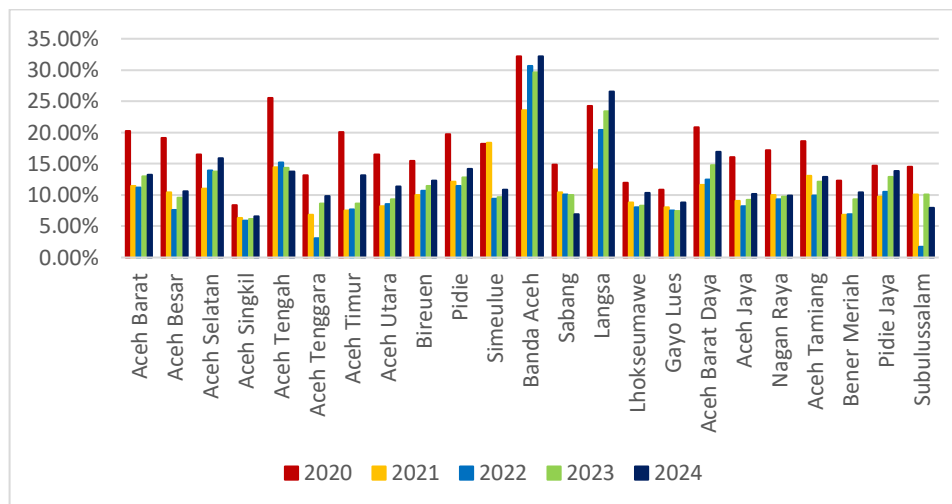
Sumber: *Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan 2026 (telah diolah)*
Gambar 1.1 Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2024

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Aceh tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan daerah mengalami perubahan yang berbeda-beda di setiap daerah. Selain itu, Banda Aceh (24,07%), Langsa (21,01%), dan Aceh Barat Daya (14,49%) menunjukkan kinerja keuangan

yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, Aceh Singkil, Gayo Lues, dan Subulussalam masih memiliki kinerja keuangan yang relatif rendah. Secara umum, kinerja keuangan daerah di Provinsi Aceh menunjukkan peningkatan, meskipun belum terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota.

Salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, yang mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan dan aktivitas pemerintahan tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi dapat dikatakan memiliki kemampuan fiskal yang kuat karena sebagian besar sumber pembiayaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam konteks Provinsi Aceh yang memiliki status sebagai daerah otonomi khusus dan menerima Dana Otonomi Khusus (DOK), tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah. Sebagian besar kabupaten/kota di Aceh masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana otonomi khusus, yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya optimal Tassya & Nailufar, (2024).

Berikut data hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2024 pada Gambar 1.2:



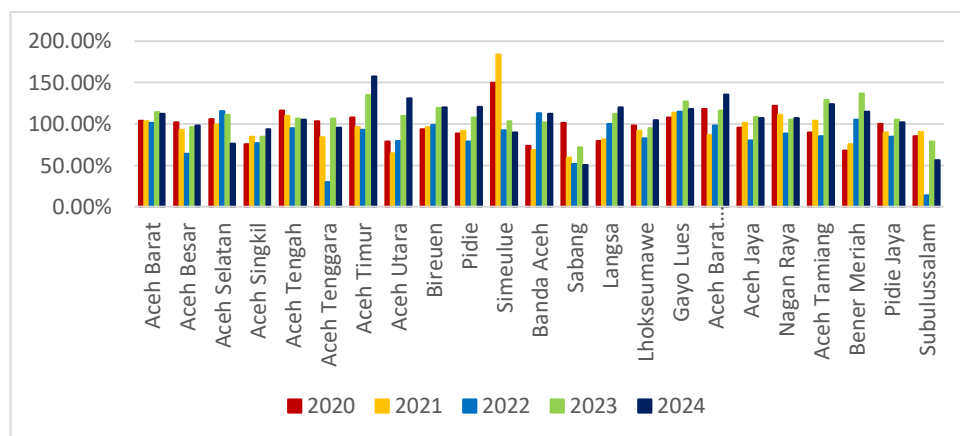
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2026 (telah diolah)
Gambar 1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2024

Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Aceh tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar daerah yang memiliki rasio di bawah 25%, sehingga masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, Banda Aceh memiliki rasio kemandirian tertinggi sebesar 32,18%, diikuti oleh Langsa sebesar 26,59%. Sementara itu, Aceh Singkil, Gayo Lues, dan Subulussalam memiliki tingkat kemandirian yang relatif rendah. Meskipun beberapa daerah mengalami peningkatan, secara keseluruhan kemandirian keuangan daerah di Aceh masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan Maulana et al., (2022) menyatakan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan pada penelitian Ma'rifat

et al., (2024) menyatakan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Selain tingkat kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi ukuran penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana realisasi PAD mampu mencapai target yang direncanakan dalam APBD. Namun, di Provinsi Aceh capaian efektivitas PAD antar kabupaten/kota masih bervariasi. Beberapa daerah menunjukkan realisasi PAD yang tinggi, sedangkan daerah lainnya belum mampu mencapai target yang ditetapkan, sehingga mengindikasikan perbedaan dalam kemampuan dan strategi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Yusnira & Sartika, (2024).

Berikut data hasil rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2024 pada Gambar 1.3:



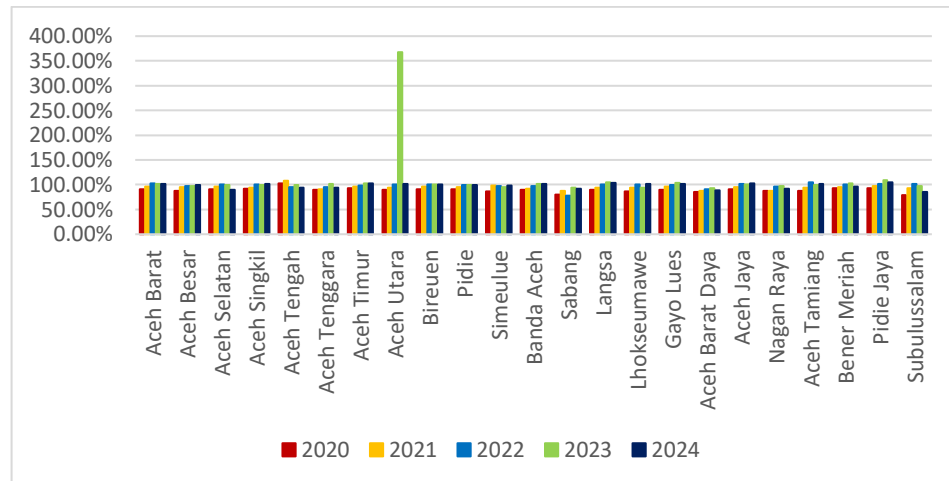
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2026 (telah diolah)
Gambar 1.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022-2024

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas PAD kabupaten/kota di Aceh tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa kemampuan pemerintah daerah sudah cukup baik dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari banyaknya daerah yang memiliki rasio efektivitas di atas 100%, yang berarti realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, daerah dengan tingkat efektivitas PAD tertinggi adalah Aceh Timur (157,11%), Aceh Barat Daya (135,27%), dan Aceh Utara (130,78%). Sementara itu, beberapa daerah seperti Aceh Singkil, Sabang, dan Subulussalam masih memiliki rasio di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan Putri & Syahzuni, (2024) menyatakan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan pada penelitian Supriyadi & Ahmad, (2021) menyatakan rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Selanjutnya, rasio efisiensi belanja daerah juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran secara hemat, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Belanja daerah yang efisien menggambarkan pengelolaan keuangan yang baik karena setiap pengeluaran mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Namun, di Aceh masih ditemukan variasi efisiensi belanja antar kabupaten/kota, di mana beberapa daerah menunjukkan realisasi anggaran yang tidak proporsional dengan hasil pembangunan yang dicapai. Kondisi ini menandakan perlunya peningkatan dalam perencanaan dan

pelaksanaan anggaran agar belanja publik lebih efektif dan produktif Chandra et al., (2022).

Berikut data hasil Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2024 pada Gambar 1.4:



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2026 (telah diolah)
Gambar 1.4 Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022-2024

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi belanja kabupaten/kota di Aceh tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi belanja daerah masih mengalami naik turun dan berbeda-beda di setiap daerah. Rasio di bawah 100% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien, sedangkan rasio di atas 100% menunjukkan bahwa pengeluaran daerah masih kurang efisien. Selain itu, daerah yang memiliki tingkat efisiensi yang baik yaitu Subulussalam (85,38%), Aceh Barat Daya (88,90%), dan Aceh Selatan (90,08%). Sementara itu, Pidie Jaya (104,80%), Langsa (103,80%), dan Aceh Timur (102,14%) masih menunjukkan penggunaan anggaran yang kurang efisien. Nilai rasio tertinggi terdapat pada Aceh Utara tahun 2023 sebesar 368,04%, yang menunjukkan bahwa pengeluaran belanja

daerah jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan Rahil et al., (2024) menyatakan rasio efisiensi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan pada penelitian Wulandari et al., (2023) menyatakan rasio efisiensi belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh diduga dipengaruhi oleh tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi belanja, sehingga penting untuk mengkaji pengaruh ketiga rasio tersebut terhadap kinerja keuangan daerah. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Mayanti et al., (2023), menunjukkan bahwa ketiga rasio tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Aceh, namun penelitian tersebut belum membahas secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan variasi tingkat kemandirian, efektivitas PAD, dan efisiensi belanja antar kabupaten/kota di Aceh.

Beberapa penelitian hanya menilai hubungan antar variabel secara umum tanpa memperhatikan konteks khusus Provinsi Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus yang menerima Dana Otonomi Khusus (DOK), yang berpotensi memengaruhi tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh ketiga rasio keuangan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi belanja terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh secara lebih komprehensif dan kontekstual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh?
2. Apakah rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh?
3. Apakah rasio efisiensi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk menganalisis pengaruh rasio efisiensi belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini serta perumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan efisiensi belanja daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keuangan daerah dan akuntansi sektor publik. Penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi belanja terhadap kinerja keuangan daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik sejenis.